BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Perubahan Iklim
Edisi : 20/Oktober/2007
Hari : Sabtu
Halaman : 10

Bank Dunia Susun Program Perubahan Iklim

Untuk mengatasi perubahan iklim global dan penggundulan hutan secara signifikan, Bank Dunia mengembangkan dua fasilitas pembiayaan karbon baru untuk memberi manfaat bagi dunia berkembang. Dua program tersebut adalah Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang inovatif akan mencegah penggundulan hutan dengan memberi kompensasi kepada negara berkembang atas pengurangan karbon dioksida yang dihasilkan dari menjaga hutan mereka.

Program Bank Dunia lainnya adalah Carbon Partnership Facility (CPF). Keduanya bertujuan untuk mendukung negara-negara berkembang dalam gerakan mereka menuju jalur pembangunan yang menghasilkan lebih sedikit karbon, dengan membantu menghilangkan gas penangkap panas dari atmosfer yang mengubah iklim. "Negara-negara berkembang akan mendapatkan dana dan teknologi ramah lingkungan sebagai imbalan atas pengurangan emisi gas rumah kaca yang mereka jual ke negara maju," ujar Presiden Kelompok Bank Dunia, Robert B Zoellick dalam siaran pers yang diterima *SP*, belum lama ini.

Harus Tegas

Terkait dengan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas dan tidak silau akan iming-iming bantuan atau kompensasi yang ditawarkan negara-negara maju yang justru bisa menjebak Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Para Pihak (Conference Of Meeting/ COP) ke-13 Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim yang akan berlangsung di Bali 3-14 Desember 2007.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Slamet Daroyini, saat dihubungi SP di Jakarta, Kamis (18/10). Dikatakan, sebagai tuan rumah Indonesia justru harus menggalang kekuatan-kekuatan di semua lini untuk menekan negara-negara maju mengurangi emisinya melalui mekanisme yang sudah ditetapkan Protokol Kyoto.

Menurut Slamet, pertemuan 40 menteri lingkungan hidup di Bogor pekan depan yang merupakan pertemuan awal menyongsong COP13 di Bali, bisa dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan ketegasan dan keberpihakan Indonesia terhadap lingkungan terkait perubahan iklim.

Seperti diberitakan sebanyak 40 menteri lingkungan akan berkumpul di Istana Bogor, Jawa Barat, 23-25 Oktober 2007 sebagai langkah awal memasuki COP13. Pertemuan tersebut dihadiri negara-negara yang merupakan perwakilan kelompok negara seperti wakil kelompok negara pemilik hutan, negara berkembang, negara kepulauan, negara miskin, dan negara maju, namun hasilnya tidak mengikat.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam pertemuan Bogor nanti, Indonesia akan memaparkan makalah tentang pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi. *(SP, 17/10)*

Slamet mengkritik sejumlah langkah dan kebijakan pemerintah yang dinilainya masih lemah karena terfokus pada mekanisme pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang.

"Sangat memprihatinkan kalau kita hanya terfokus pada bantuan yang berarti isu utama yakni pengurangan emisi menjadi terpinggirkan. Saya juga tidak yakin setelah mendapat bantuan kita bisa mempergunakan dananya untuk perbaikan lingkungan. Bisa-bisa dana itu dikorupsi juga. Harus diketahui bahwa jumlah uang yang akan diberikan itu tidak sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan akibat perubahan iklim," ujarnya.

Pertemuan di Bogor nanti, lanjutnya, sudah harus terlihat ketegasan dari negara berkembang agar mau mengurangi emisi gas rumah kaca mereka yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia, tambahnya, harus mengambil peran strategis untuk menaikkan posisi tawar terhadap negara-negara peserta terkait haknya sebagai tuan rumah. "Kita jangan hanya bangga menjadi tuan rumah yang baik, tetapi momen di Bali bisa menjadikan Indonesia disegani di dunia," katanya. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup